

RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN ROTE NDAO



Sekati Seseana Membangun Rote Ndao Baru

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao maka salah satu tahapan yang merupakan system perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2019 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao merupakan penjabaran tahunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao periode 2019 – 2024, dengan menyampaikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RENJA dengan mempertimbangkan sinergitas antar sector dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang selanjutnya diformulasikan melalui Forum MUSRENBANG Kabupaten.

Dokumen RENJA ini merupakan sub system yang sangat penting sebagai input dalam penyusunan program dan Penyelenggaraan SKPD yang merupakan dokumen public, sehingga telah melibatkan semua stakeholder dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan APBD.

Dengan demikian diharapkan RENJA Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 ini dapat menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam 1 (satu) Tahun Anggaran pada Badan Pendapatan.

Baa, 20 Januari 2020
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Rote Ndao

Melkianus Ndun, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP.19630327 198503 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1 Tujuan dan Sasaran	12
3.2 Program dan Kegiatan	13
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	15
BAB IV.PENUTUP.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bapenda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 didasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao (RPJMD) tahun 2014-2019;
9. Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 – 2024

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan teknis dan pedomaan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020 bagi masing-masing bidang dan sekretariat dalam rangka mengemban Visi, dan Misi Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 dan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah(RKA- SKPD) Kabupaten Rote Ndao.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah unuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan kegiatan tahunan secara efisien, akuntabel, transparan, mempertajam prioritas program kegiatan dan kesinambungan program kegiatan dari tahun ke tahun serta menjadi instrumen dalam penyusunan kegiatan tahunan dengan bermuara pada:

- a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan
- b) Terarahnya pelaksanaan program pembangunan
- c) Semakin terkoordinasinya dan terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Selain menyusun Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang akan berjalan, Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao juga melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja tahun anggaran sebelumnya sebagai progress report atas hasil implementasi perencanaan strategis dan pengukuran hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;
- e. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2019 sebagai bahan (entry point) dalam penyusunan perencanaan tahun 2020;
- f. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao, mendapat Alokasi Dana dari APBD sebesar Rp. **7.092.851.818,-** dengan realisasi Rp. **6.817.693.994,-** atau mencapai **96,12%** dengan rincian sebagai berikut :

- A.** Belanja tidak langsung, target yang ditetapkan Rp. **4.105.512.818,-** dengan realisasi sebesar Rp. **3.900.274.667,-** Atau **95%** yang terdiri dari :

- a. Gaji dan Tunjangan Pegawai, target yang ditetapkan Rp. 3.080.379.109,- dengan realisasi sebesar Rp.2.986.763.373,- atau 96,96%.
- b. Tambahan Penghasilan PNS, target yang ditetapkan Rp. 358.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 350.050.000,- atau 97,72%.
- c. Insentif Pemungutan Pajak Daerah, target yang ditetapkan Rp. 363.893.509,- dengan realisasi sebesar Rp. 363.893.509,- atau 100%.
- d. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, target yang ditetapkan Rp. 303.040.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.567.785,- atau 65,86%.

B. Belanja Langsung, target yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.987.339.000,- Realisasi Belanja sebesar **Rp. 2.917.419.327,-** atau mencapai **97,66 %** dengan perincian sebagai berikut :**

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target Belanja sebesar Rp. 785.076.142,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 767.099.099,- atau presentase penyerapan dana mencapai 97,71% dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target Belanja sebesar Rp.3.498.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.3.294.500,- atau presentase penyerapan mencapai 94,18%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Target Belanja sebesar Rp.33.175.892,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.27.171.933,- atau presentase penyerapan dana mencapai 81,90%.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Target Belanja sebesar Rp. 5.650.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.3.814.200,- atau presentase penyerapan mencapai 67,51%.

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Target Belanja sebesar Rp.120.132.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.120.105.000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,98%.

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target Belanja sebesar Rp.1.496.500,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.1.493.500,- atau presentase penyerapan mencapai 99,80%.

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Target Belanja sebesar Rp.2.600.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.2.600.000,- atau presentase penyerapan mencapai 100%.

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target Belanja sebesar Rp.57.940.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.57.225.000,- atau presentase penyerapan mencapai 98,77%.

8. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
Target Belanja sebesar Rp.246.048.250,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.244.832.200,- atau presentase penyerapan mencapai 99,51%.
9. *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
Target Belanja sebesar Rp.13.047.500,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.13.047.500,- atau presentase penyerapan mencapai 100%.
10. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*
Target Belanja sebesar Rp.3.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 2.980.000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,33%.
11. *Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah*
Target Belanja sebesar Rp.109.040.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.103.759.966,- atau presentase penyerapan mencapai 95,16%.
12. *Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran*
Target Belanja sebesar Rp.117.018.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.116.942.000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,94%.
13. *Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Wilayah Propinsi NTT*
Target Belanja sebesar Rp.72.430.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.69.833.300,- atau presentase penyerapan mencapai 96,41%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target Belanja sebesar Rp.512.765.500,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.503.036.800,- atau presentase penyerapan mencapai 98,10% dengan perincian sebagai berikut :

1. *Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional*
Target Belanja sebesar Rp.60.683.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 60.678.000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,99%.
2. *Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor*
Target Belanja sebesar Rp.452.082.500,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.442.358.800,- atau presentase penyerapan dana mencapai 97,85%.

3..Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Target Belanja sebesar Rp.10.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.9.898.100,- atau presentase penyerapan mencapai 98,98% dengan perincian sebagai berikut :

1. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD.*

Target Belanja sebesar Rp.10.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 9.898.100,- atau presentase penyerapan mencapai 98,98%.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Target Belanja sebesar Rp.1.679.479.358,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.1.637.385.328,- atau presentase penyerapan mencapai 97,49% dengan perincian sebagai berikut :

1. *Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah*

Target Belanja sebesar Rp.100.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 99.995.000,- atau presentase penyerapan mencapai 100%.

2. *Peningkatan dan Identifikasi Obyek Pajak PBB P2, NJOP, NOP dan ZNT*

Target Belanja sebesar Rp.75.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 73.641.982,- atau presentase penyerapan mencapai 98,19%.

3. *Evaluasi dan Pelaporan PAD*

Target Belanja sebesar Rp.82.500.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 81.265.800,- atau presentase penyerapan mencapai 98,50%.

4. *Rekonsiliasi Penerimaan PAD*

Target Belanja sebesar Rp.82.500.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 80.925.878,- atau presentase penyerapan mencapai 98,09%.

5. *Penetapan Zona Nilai Tanah dan Analisis Nilai Perolehan Bangunan*

Target Belanja sebesar Rp.80.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 79.073.100,- atau presentase penyerapan mencapai 98,84%.

6. *Pembentukan Basis Data PBB*

Target Belanja sebesar Rp.280.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 261.656.950,- atau presentase penyerapan mencapai 93,45%.

7. *Pembinaan dan Penyuluhan PAD*

Target Belanja sebesar Rp.280.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 278.652.012,- atau presentase penyerapan mencapai 99,52%.

8. *Fasilitasi Pelaksanaan Aplikasi Pendapatan Daerah*

Target Belanja sebesar Rp.251.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 239.359.000,- atau presentase penyerapan mencapai 95,36%.

9. *Pembentukan Basis Data Pajak Daerah*

Target Belanja sebesar Rp.121.651.400,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 121.444.562,- atau presentase penyerapan mencapai 99,95%.

10. *Perhitungan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah*

Target Belanja sebesar Rp.104.445.958,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 104.092.200,- atau presentase penyerapan mencapai 99,66%.

11. *Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Perjanjian Sewa dan SKRD*

Target Belanja sebesar Rp.105.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 103.730.900,- atau presentase penyerapan mencapai 98,63%.

12. *Pengelolaan dan Updating Data Retribusi Daerah*

Target Belanja sebesar Rp.117.400.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp.113.547.544,- atau presentase penyerapan mencapai 96,72%

Table 1
 Financial Statement of the Department of Health Services for the Period
 Ending 31st March 2005
 (All figures in thousands of dollars)

Code	Accounting Unit/Department/Division/Program Name	Other Accounting Unit/Department/Division	Departmental Income Statement					Total Departmental Income	Total Departmental Expenditure	
			Total Income from Government Grants	Total Income from Other Sources	Total Income from Commercial Activities	Total Income from Investments	Total Income from Other Income		Total Expenditure on Current Services	Total Expenditure on Capital Services
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000	

	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Income Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000
	Departmental Expenditure Statement		1,234,567	876,543	543,210	210,987	1,720,000	1,720,000	1,720,000

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Secara umum Badan Pendapatan telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal, namun demikian masih banyak hal yang perlu dibenahi, untuk memperbaiki kinerja OPD.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang pendapatan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Capaian Kinerja pada Badan Pendapatan merupakan Uraian tentang capaian dan analisis kinerja yang menggambarkan mengenai capaian kinerja rutin maupun pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program selama Tahun 2019 yang terdiri dari :

- A. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp.785.076.142,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.767.099.099,- (97,71%). Capaian Kinerja Sangat Baik.
- B. Program peningkatan sarana dan pra sarana aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp.512.765.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.503.036.800,- (98,10%). Capaian Kinerja Sangat Baik.
- C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 9.898.100,- (98,98%). Capaian Kinerja Sangat Baik.

D. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.679.479.358,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.637.385.328 (97,49%). Capaian Kinerja Sangat Baik.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya, namun peningkatan tersebut belum optimal, masih banyak beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao dalam peningkatan optimalisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kualitas dan kapasitas SDM BadanPendapatan;
2. Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional untuk melaksanakan kegiatan terutama pada pengelolaan pendapatan;
3. Masih adanya ketergantungan sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan yang berasal dari pusat;
4. Tuntutan target penerimaan pendapatan asli daerah yang selalu meningkat;
5. Potensi PAD belum dikelola secara maksimal;
6. Nilai objek pajak PBB yang belum sesuai dilapangan;
7. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
8. Instansi pengelola income selain Badan Pendapatan masih ada yang belum mencapai target penerimaan pendapatannya yang mempengaruhi capaian penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan;
9. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan;
10. Tuntutan kurangnya transparansi / publikasi APBD kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah. Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Pendapatan Daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tujuan Renja Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah terhadap APBD Kabupaten Rote Ndao guna mendukung percepatan pembangunan;
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Sasaran Renja Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Merealisasikan target penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain dan Bagi Hasil;
2. Menciptakan sistem manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertib dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pengelola Pendapatan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 13 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional.

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah.
12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.
13. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Wilayah Prop. NTT.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 2 kegiatan yaitu:

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
2. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 1 (satu) Kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ada 12 Kegiatan dengan Perincian sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah.
2. Peningkatan dan Identifikasi Obyek Pajak PBB P2, NJOP, NOP dan ZNT.
3. Evaluasi dan Pelaporan PAD
4. Rekonsiliasi Penerimaan PAD.
5. Penetapan Zona Nilai Tanah dan Analisis Nilai Perolehan Bangunan.
6. Pembentukan Basis Data PBB.
7. Pembinaan dan Penyuluhan PAD.
8. Fasilitasi Pelaksanaan Aplikasi Pendapatan Daerah.

9. Pembentukan Basis Data Pajak Daerah.
10. Perhitungan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah.
11. Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Perjanjian Sewa dan SKRD.
12. Pengelolaan dan Updating Data Retribusi Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**TABEL 3
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

NO	KODE	URaian/Deskripsi Unit/Program/Instansi/Barang dan Kendaraan	Keterangan/Spesifikasi/Detail/Model/Barang	RINCIAN RENCANA DAN ALOKASI PENDANAAN				PERSARAN SARANA PENDANAAN JABAT
				TARGET (KI)	PERANGKAT (KPI)	LOKASI	BANGUN DAWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Teknologi/Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran					
		Pembelian barang dan jasa lainnya	Penelitian Jasa Studi Merancang Sumber Daya Manusia, Teknologi Jasa Pelayanan Kantor, Alat Tulis Kantor Standar Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Internet, Laminasi/Plakat, Komputer Kertas, Bahan Baku dan Perawatan/Underlay	10	Barang			
		Pembelian Jasa dan/atau Jasa Lain	Penelitian Fasilitas dan perlengkapan kantor	2	PK KAWAN	48.000,00	Kab. Pangkajene	DALU
				2				
		Pembelian Jasa dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa Pelatihan/Pendidikan dan Pengembangan Tenaga, Jasa Penjualan dan Perawatan Kendaraan Otomatis, Jasa Pelayanan Penerimaan Kas, Teknologi/Strategi Pembelajaran, Fasilitas/Barang Kebutuhan Dasar/Operasional, Perawatan Gedung Kantor	4	Barang	42.000,00		
				1	JK			
				2	Barang			
		Pembelian Jasa dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa Administrasi Keuangan	11	Barang	19.000,00	Kab. Pangkajene	DALU
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	1	Barang	20.000,00	Kab. Pangkajene	DALU
		Pembelian Jasa dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa dan/atau Jasa Lain	1	Barang	40.000,00	Kab. Pangkajene	DALU
		Akuisisi dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa dan/atau Jasa Lain	1	Barang	10.000,00	Kab. Pangkajene	DALU
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	1	Barang	10.000,00	Kab. Pangkajene	DALU
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	1	Barang	10.000,00	Kab. Pangkajene	DALU
		Program Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Standar Layanan	Penelitian/Strategi dan Peningkatan Standar Layanan					

		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	1	Barang	10.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Akuisisi dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa dan/atau Jasa Lain	1	Barang	40.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	27	Barang	47.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Program Peningkatan Paket Dasar	Penelitian/Strategi Paket Dasar						
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa dan/atau Jasa Lain	3	Barang	11.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	100	Barang	20.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa dan/atau Jasa Lain	20	Barang	20.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa dan/atau Jasa Lain	1	Barang	2.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	1	Barang	2.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Program Peningkatan Paket Dasar dan Peningkatan	Penelitian/Strategi Paket Dasar dan Peningkatan						
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa dan/atau Jasa Lain	1	Barang	10.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	100	Barang	20.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa dan/atau Jasa Lain	10	Barang	20.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	10	Barang	20.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Program Peningkatan, Peningkatan dan Peningkatan PAK	Penelitian/Strategi Peningkatan, Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan PAK						
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa dan/atau Jasa Lain	1	Barang	20.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	1	Barang	20.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Jasa dan/atau Jasa Lain	1	Barang	20.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA
		Pembelian, Sewaan dan/atau Jasa Lain	Penelitian Paket/OPD, Paket Perangkat Lunak, UPD, UPD, UPD dan Paket/Barang	1	Barang	20.000,00	Kab. Pangkajene	DALU	SAPINDA

	Klasifikasi dan subklasifikasi dari penelitian yang dilakukan	Kategori dan subkategori dari penelitian	1	Tipe	Tahapan	Metode	Data	Analisis
					1. Tahap			

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 ini merupakan podoman bagi segenap aparatur untuk melaksanakan program dan kegiatan serta memudahkan dalam pengendalian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao tergantung pada aparatur Badan Pendapatan itu sendiri serta peran semua pihak yang ada kepentingannya dengan kepegawaiaan.

Dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan Rencana Kerja (Renja) ini berubah karena beberapa faktor antara lain:

- a. Regulasi / aturan dari Pemerintah Pusat
- b. Kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- c. Karena kebutuhan/kepentingan organisasi lain.

Namun perubahan-perubahan yang dilakukan tidak terlalu jauh berbeda dengan garis-garis besar perencanaan yang telah disusun. Dengan tersusunya Rencana Kerja ini diharapkan pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao dapat lebih meningkatkan menuju kearah pelayanan yang prima.

Baa, 20 Januari 2020
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Rote Ndao

Melkianus Ndun, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19630327 198503 1 014